

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoellah, Priyatmanto. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Abdullah, Rozali. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basah, Sjachran. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bruggink, J. J. H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dacey, A.V. 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Terjemahan dari *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Bandung: Nusamedia.
- Hadjon, Philipus M. 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanitjo Soemitro, Rony .1988. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indah.

- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartasapoetra, G. dkk. 1994. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Marbun, SF. dan Mahfud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- MD, Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- R Budiono, Abdul. 2009. *Hukum Perburuhan* Jakarta: PT. Indeks.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni,
- Rusli, Hardijan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU NO 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sidharta, B. Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. Jurnal Jentera Ed. 3 Tahun II. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
- Situmorang, Victor dan Soediby. 1992. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjardi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Rony Hanitjo. 1988. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.

Subekti, R dan R. Tjitrosoedibio. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suparto, Wijoyo. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: UNAIR Press.

Tjandra, W. Riawan. 2003. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Utrecht, E. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Penerbit Tinta Mas.

Wijayanti, Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Karya Tulis Ilmiah**

Hasrul, Muh. 2013. *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*. Disertasi. Makasar: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Zurahmah dan Firman Umar. "Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan (Studi Kasus Di

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)”, Jurnal PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 235/KEP/2016, tertanggal 1 November 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 01/G/2017/PTUN.YK.